



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tidak Kembalikan Mobnas Bisa Pidana,

= Eks Ketua DPRD & Mantan Bupati MM

RBI, BENGKULU - Masih ada sembilan Mobil Dinas (Mobnas) yang belum dikembalikan oleh mantan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu. Berkaca dengan kasus di Mukomuko, mantan Ketua DPRD dan mantan Bupati Mukomuko masuk penjara karena kasus mobil dinas tak dikembalikan. Akankan kasus serupa menimpa mantan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu?

Menurut praktisi hukum Bengkulu, Dr Elektison Somi, SH, M.Hum, jika penggunaan Mobnas tersebut tidak sesuai prosedur maka bisa saja berujung pidana terhadap para mantan pimpinan DPRD maupun pejabat yang memberikan izin pinjam kendaraan yang merupakan aset daerah tersebut.

"Kalau mantan Bupati Mukomuko dulu, adanya surat pinjam pakai secara tertulis yang dikeluarkan oleh kepala daerahnya saat itu untuk para mantan pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko. Itu yang kemudian menjerat karena ada surat secara tertulis pinjam pakainya tidak sesuai prosedur, kemudian yang bersangkutan terindikasi pidana korupsi.

Sedangkan untuk Mobnas DPRD Provinsi ini, harus dilihat dulu, kalau memang dasar penggunaan Mobnas oleh para mantan pimpinan DPRD ini dilakukan secara tertulis resmi, maka bisa mengarah sama dengan kasus pinjam pakai kendaraan dinas di Mukomuko. Kalaupun itu pinjam pakai tidak resmi, artinya penanggung jawab barang, pengguna barang harus meminta menarik kembali ken-

daraan operasional Mobnas itu tadi. Kalau itu nyata dilakukan secara administratif yang dilakukan perbuatan untuk pengamanan terhadap aset daerah maka yang bersangkutan tadi bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum," ungkap Elektison, Selasa (14/1).

Jika penanggung jawab barang Mobnas itu tidak mau menimbulkan persoalan hukum pada dirinya, maka penanggungjawab barang itu bisa melaporkan. Karena ada ruang yang dilakukannya terlebih dahulu sebagai penanggungjawab barang aset daerah di DPRD Provinsi Bengkulu itu.

"Kalau dia menggunakan alasan pengamanan, maka bisa dilayangkan surat penagihan untuk pengembalian secara persuasif. Tapi kalau itu sudah dilakukan dan mantan pimpinan belum juga mengembalikan Mobnas, maka harus diikuti lagi dengan tahapan berikutnya, yaitu upaya paksa bisa melibatkan Satpol PP dan juga ditembuskan pada aparat penegak hukum disitu. Tapi kalau pejabat penanggungjawab tidak tegas disitu, maka dikemudian hari ada yang melaporkan kemudian APH menindaklanjuti terhadap kondisi itu, dapat juga diminta pertanggungjawaban disitu. Sebab nanti indikasinya dia bertindak tidak tegas tapi tidak tuntas dalam upaya administratifnya," terangnya.

Kewajiban penanggungjawab barang harus tegas dan tuntas, jika sudah dua kali disurati namun tidak juga dikembalikan, tarik paksa

harus ada upaya penyelesaian tindaklanjutnya, pejabat itu mempunyai kewenangan tarik paksa.

"Ini secara administrasi gak ada batas waktu upaya pengembalian secara persuasif maupun tarik paksa, tapi dalam pertanggungjawaban pengelolaan terhadap aset tahunan. Seharusnya itu dilakukan sebelum pertanggungjawaban tahunan barang dan aset. Kapan itu dilakukan? Akhir tahun 2019 lalu, sudah masuk seharusnya itu kan itu dilaporkan. Dan semestinya bagi para mantan pimpinan DPRD itu, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terlebih lagi mereka public figure, praktisi politik dan ada bendera partai yang melekat pada mereka. Seharusnya mereka membangun citra positif bagi public disitu, kembalikan saja.

Kalau mereka tidak juga mengembalikan yang dirugikan DPRD sendiri secara kelembagaan, sebab kendaraan operasional itu untuk mendukung kegiatan secara kelembagaan. Pejabat berwenang harus tegas gak bisa hanya melayangkan dua surat kemudian menunggu saja," pungkask Elektison.

Sebelumnya dari Plt Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, Syaiful SH dia menyampaikan pihaknya telah kembali melayangkan surat kepada para mantan pimpinan dewan tersebut agar mengembalikan Sembilan Mobnas yang masih belum kembali. "Kita lakukan secara persuasif dan kami sudah mengirimkan surat kembali," sampainya. (idn)